

ANALISIS PERBANDINGAN KONTRAK CHATGPT DENGAN PENGGUNA DAN PERUSAHAAN CHATGPT ENTERPRISE

Oleh:

Muhammad Zidane Baihaqie

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026



Pendahuluan

Latar Belakang

- Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah hubungan hukum dalam kontrak elektronik.
- ChatGPT digunakan oleh pengguna individu maupun perusahaan melalui ChatGPT Enterprise.
- Kedua layanan menggunakan klausula baku, tetapi memiliki karakter hubungan hukum yang berbeda.
- Perbedaan tersebut memengaruhi perlindungan data, pembatasan tanggung jawab, dan posisi tawar para pihak

Urgensi Penelitian

Masih terdapat persoalan **rechtsvacuum**, **vague norm**, dan potensi konflik antara kebijakan OpenAI dengan hukum Indonesia

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana perbedaan klausula baku antara ChatGPT dengan pengguna umum dan ChatGPT Enterprise dengan perusahaan?
2. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan klausula baku tersebut terhadap hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak?

Metode

Penelitian menggunakan **penelitian hukum normatif**.

Pendekatan

- Statute Approach
- Conceptual Approach

Bahan Hukum

- KUHPerdata
- UU ITE
- Terms of Use ChatGPT
- Business Terms ChatGPT Enterprise

Analisis

- Interpretasi gramatikal
- Interpretasi sistematis
- Analisis deduktif

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum teknologi informasi terkait penggunaan Artificial Intelligence dalam hubungan hukum digital.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, keseimbangan para pihak, dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik berbasis AI.

Pembahasan

Analisis Klausula Baku

- ChatGPT menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh OpenAI.
- Pengguna umum tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi kontrak.
- Enterprise tetap menggunakan klausula baku, namun memberikan perlindungan data, keamanan, dan tata kelola organisasi yang lebih baik.
- Klausula **limitation of liability** tetap ada pada kedua layanan, tetapi pada Enterprise diimbangi dengan perlindungan kepentingan bisnis.

Kesimpulan Analisis

- Hubungan hukum pada ChatGPT Enterprise lebih seimbang dibandingkan hubungan hukum antara OpenAI dengan pengguna umum.

Pembahasan

Analisis Permasalahan Normatif

- **Rechtsvacuum**
Belum terdapat pengaturan khusus mengenai kontrak AI di Indonesia.
- **Vague Norm**
Belum terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab atas output AI.
- **Konflik Norma**
Kebijakan OpenAI
KUHPerdata
UU ITE
- **Implikasi**
Diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap kontrak elektronik berbasis AI.

Hasil

Kedudukan Hukum Pengguna Umum dan Perusahaan

Aspek	Pengguna Umum ChatGPT	Perusahaan ChatGPT Enterprise
Bentuk Hubungan Hukum	Konsumen dengan penyedia layanan digital	Hubungan bisnis korporasi (business-to-business)
Jenis Kontrak	Terms of Use standar	Business Terms dan layanan Enterprise
Posisi Tawar	Lemah, tanpa negosiasi	Relatif lebih seimbang
Penggunaan Data	Data dapat digunakan untuk pengembangan model	Data bisnis tidak digunakan untuk pelatihan model secara default
Kontrol Data	Terbatas	Lebih besar dan terstruktur
Perlindungan Privasi	Bersifat umum	Memiliki fitur keamanan dan privasi korporasi
Pengelolaan Akun	Individual	Dikelola administrator organisasi
Kepentingan Hukum	Perlindungan konsumen	Perlindungan kepentingan bisnis dan data perusahaan

Kesimpulan

- ChatGPT dan ChatGPT Enterprise sama-sama menggunakan **kontrak elektronik berbentuk klausula baku**, tetapi memiliki **hubungan hukum dan tingkat perlindungan hukum yang berbeda**.
- **Pengguna umum** memiliki posisi tawar yang lebih lemah karena terikat pada mekanisme *take it or leave it*, klausula penggunaan data, dan pembatasan tanggung jawab yang lebih dominan.
- **ChatGPT Enterprise** memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan data, pengelolaan informasi bisnis, dan kontrol penggunaan layanan sehingga posisi hukumnya relatif lebih seimbang.
- Perbedaan klausula baku memengaruhi **keseimbangan hubungan hukum dan perlindungan hukum** para pihak.
- Diperlukan **penguatan regulasi kontrak berbasis AI** untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia

Referensi

- null N. N. P. Cahya, null I. A. Anhar, null H. Firmansyah, and null R. K. Rajib, “Penerapan Bahasa Hukum Sederhana (Plain Language) dalam Perancangan Kontrak dan Pengaruhnya terhadap Asas Kebebasan Berkontrak serta Kepastian Hukum di Indonesia,” *Stud. J. Humanit. Educ. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 303–311, Nov. 2025, doi: 10.66749/dfdna029.
- [2] N. Kasih and A. Pawestri, “Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 4, pp. 12–12, Apr. 2025, doi: 10.47134/ijlj.v2i4.3954.
- [3] B. Handoko and R. L. A. Prihadiati, “Kepastian Hukum Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing di Sektor Konstruksi,” *Humaniorum*, vol. 1, no. 2, pp. 63–72, Apr. 2023, doi: 10.37010/hmr.v1i02.16.
- [4] null M. R. Arisandy, null H. Yogawiratama, null D. Susanto, null R. Alpenzu, null B. A. Sentosa, and E. Erleni, “Legalitas Perjanjian Valet Parking Di Lihat Dari Pasal 1 320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Consens. J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 29–34, Aug. 2023, doi: 10.46839/consensus.v2i1.38.
- [5] F. R. A. Wibawa and ' Tuhana, “Keabsahan Purchase Order Berbahasa Asing Sebagai Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan,” *J. Priv. Law*, vol. 12, no. 1, pp. 46–46, May 2024, doi: 10.20961/privat.v12i1.50435.

